

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tahun 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, disesuaikan dengan Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta ini, semoga kebersamaan kita dapat mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Surakarta, 01 Desember 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



NICO AGUS PUTRANTO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19710604 199212 1 003

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	4
II. Pengertian Indikator Kinerja	6
A. Definisi.....	6
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	6
III. Gambaran Umum BPBD Kota Surakarta.....	8
A. Visi dan Misi.....	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
IV. Penetapan Indikator Kerja Utama.	16
V. Penutup	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, disesuaikan dengan Visi dan misi daerah Kota Surakarta”.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 07 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan criteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA

A. VISI dan MISI

Visi pembangunan Kota Surakarta sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibutuhkan Misi yang harus dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Misi untuk mendukung terwujudnya Visi yaitu Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta adalah Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana.

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemeritahan

Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara kumulatif akan tercapai dalam 5 (lima) tahun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

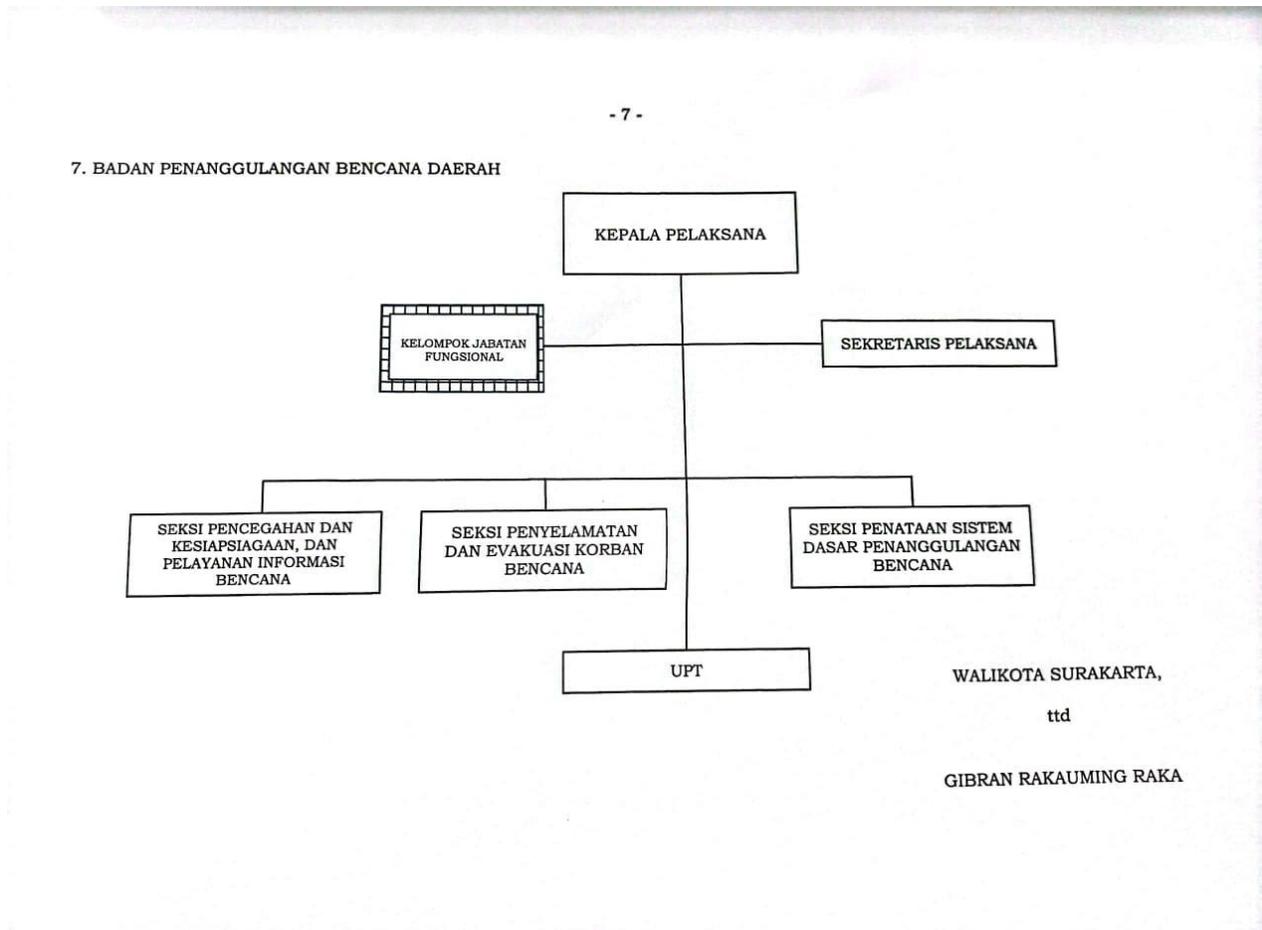
- a. perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana, Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Seksi - seksi yang dipimpin Kepala Seksi, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pelayanan Informasi Bencana
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 3) Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:

**Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surakarta**



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana

i. Identitas :

Nama : Nico Agus Putranto, S. H

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ii) Tugas :

Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai uraian tugas:

- 1) Perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaantugasterkait penanggulangan bencana daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

iii) Fungsi :

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan system dasar penanggulangan bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan system dasar penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan system dasar penanggulangan bencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan

- dan evakuasi korban bencana, serta penataan system dasar penanggulangan bencana;
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

i) Identitas

Nama : Heri Sutoyo, S. E

Jabatan : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ii) Tugas :

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan.

iii) Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum badan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- 5) Penyelenggaraan pengadaan barangmilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- 6) Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- 7) Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
- 8) Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- 10) Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- 11) Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- 12) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pelayanan Informasi Bencana

- i) Identitas :
Nama : Dhimas Harso Jiwando Adhi Nugroho, S. T
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pelayanan Informasi Bencana
- ii) Tugas :
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan penyusunan dokumen kebencanaan meliputi dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - 2) Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
 - 3) Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana daerah dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4) Melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana daerah;
 - 5) Melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan risiko bencana daerah, dan penanganan pasca bencana daerah;
 - 7) Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 8) Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 9) Membagi tugas, member petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 10) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;

- 11) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- i) Identitas :
Nama : Sularso, S. STP, M. Si
Jabatan : Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- ii) Tugas :
Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mempunyai uraian tugas:
 - 1) Melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi respon cepat darurat bencana daerah, kejadian luar biasa (KLB) zoonosis, dan bencana non alam;
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - 5) Membagi tugas, member petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 6) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - 7) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- i) Identitas :
- Nama : Singkirno, S. Pd
- Jabatan : Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana

- ii) Tugas :

Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan bencana daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Membagi tugas, member petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di dalam susunan organisasi BPBD Kota Surakarta memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kota Surakarta sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021–2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta disajikan pada lampiran Tabel IV.1, sebagai berikut :

Tabel IV.1

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian setiap Tahun						Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Level	n/a	n/a	n/a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

KETERANGAN PENILAIAN

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 di dasarkan oleh RPJMD Surakarta tahun 2021-2026 dengan menyesuaikan teknis penilaian sesuai dengan PERKA BNPB Nomor 03 Tahun 2012. Adapun Indeks Kinerja Utama BPBD Kota Surakarta 2022 memiliki 5 Prioritas dengan 22 Indikator dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Pertanyaan dan Indikator Prioritas IKU BPBD Kota Surakarta tahun 2022

Nomor Indikator	Prioritas	Indikator	Jumlah Pertanyaan	Total Pertanyaan
1	1	1	4	16
2	1	2	4	
3	1	3	4	
4	1	4	4	
5	2	1	4	16
6	2	2	4	
7	2	3	4	
8	2	4	4	
9	3	1	4	16
10	3	2	4	
11	3	3	4	
12	3	4	4	
13	4	1	4	24
14	4	2	4	
15	4	3	4	
16	4	4	4	
17	4	5	4	
18	4	6	4	
19	5	1	4	16
20	5	2	4	
21	5	3	4	
22	5	4	4	
Jumlah Pertanyaan				88

Adapun Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel Kriteria Penilaian
IKU BPBD Tahun 2022**

NO	STRUKTUR PERTANYAAN	FUNGSI PERTANYAAN	STRUKTUR PENILAIAN
1	Pertanyaan Pertama	Identifikasi inisiatif-inisiatif untuk mencapai hasil minimal setiap indikator	Bila jawabannya adalah "YA" maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 2
2	Pertanyaan Kedua	Identifikasi capaian minimal telah diperoleh atau belum	Bila jawabannya adalah "YA" maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 3
3	Pertanyaan Ketiga	Identifikasi fungsi minimum dari capaian tersebut telah dicapai atau belum	Bila jawabannya adalah "YA" maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 4
4	Pertanyaan Keempat	Identifikasi perubahan sistemik dari fungsi yang telah terbangun berdasarkan capaian yang ada	Bila jawabannya adalah "YA" maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 5

TABEL KUESIONER PENILAIAN

PRIORITAS 1 (Indikator 1) = NILAI 3 = LEVEL 4

<i>Pertanyaan Kunci</i>	<i>Respon</i>	
	YA	TIDAK
1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik penguranganrisiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentangpengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secaraterencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata GunaLahan, IMB, SOTK dll)? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	0	0

Prioritas 1 (Indikator 2) = NILAI 4 = LEVEL 5

<i>Pertanyaan Kunci</i>	<i>Respon</i>	
	YA	TIDAK
5. Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
6. Apakah BPBD dan/atau institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap tahunnya dalam APBD atau pun bentuk anggaran khusus lainnya untuk pelaksanaan aktivitas pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
7. Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait dengan PRB pada BPBD dan/atau institusi Anda (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baikdalam hal kualitas maupun kuantitasnya?	0	0
8. Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Andadan kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh masyarakat atau komunitas lain diluarinsititusi Anda?	0	0

PRIORITAS 1 (Indikator 3) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
9. Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan komunitas lokal dalam aktivitas PRB? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
10. Menurut penilaian Anda, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang ada di daerah Anda telah dengan jelas mengatur mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan komunitas lokal secara relevan dan sistematis? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
11. Apakah dalam pembagian peran dan tanggung jawab, seluruh sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan perannya secara aktif?	0	0
12. Apakah aktivitas PRB telah dipublikasikan secara transparan oleh media-media lokal - sebagai partisipasi komunitas media?	0	0

PRIORITAS 1 (Indikator 4)= NILAI 3 = LEVEL 4

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
13. Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusi-diskusi informal antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
14. Apakah telah ada suatu forum yang berfungsi untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
15. Apakah forum tersebut beranggotakan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendala-kendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
16. Menurut Anda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini?	0	0

PRIORITAS 2 (Indikator 1)= NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
17. Apakah telah dihasilkan peta ancaman bencana sebagaianalisis awal terhadap risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
18. Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko yang dilengkapi dengan peta risiko untuk seluruh jenis ancaman bencana didaerah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
19. Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
20. Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasarbagi pembangunan dan penanaman modal pada tingkat lokal/nasional?	0	0

PRIORITAS 2 (Indikator 2) = NILAI 1 = LEVEL 2

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
21. Apakah telah tersedia data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastrukturterpapar bencana dan lainnya ? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
22. Apakah data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data pendudukterpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana danlainnya - dipublikasi dengan sistem informasi sehingga memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah maupun komunitas di luar daerah https://bpbpd.surakarta.go.id/frontend/unduh	1	0
23. Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ?	0	0
24. Apakah informasi data pendukung kajian risiko yangdiperbarui secara periodik tersebut juga dapat dilihat (diakses) dan dijadikan referensi bagi daerah lain	0	0

PRIORITAS 2 (Indikator 3)= NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
25. Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifan lokal dan fenomena alam sebagai peringatan akan datangnya bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
26. Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan dini untuk setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
27. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
28. Apakah sistem peringatan dini siap beroperasi untuk skalabesar dengan jangkauan yang luas keseluruhan tingkat masyarakat?	0	0

PRIORITAS 2 (Indikator 4)= NILAI 2 = LEVEL 3

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
29. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah seperti pada pertanyaan No. 18? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
30. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah ada telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas wilayah administrasi kawasan Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	0	0
31. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan antar daerah	0	0
32. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah diimplementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas batas?	0	0

PRIORITAS 3 (Indikator 1) = NILAI 2 = LEVEL 3

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
33. Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
34. Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja yang mungkin terjadi pada hari ini di daerah anda dari sumber informasi tertulis yang tepercaya ? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
35. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi ditingkat nasional ?	0	0
36. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah ?	0	0

PRIORITAS 3 (Indikator 2) = NILAI 2 = LEVEL 3

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
37. Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani keadaan darurat bencana di sekolah? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
38. Apakah sudah terlaksana pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah ?	0	0
39. Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana di sekolah telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur dan terstruktur ?	0	0
40. Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan risiko bencana di sekolah ?	0	0

PRIORITAS 3 (Indikator 3) = NILAI 3 = LEVEL 4

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
41. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset yang terbukti mampu menurunkan kerugian bila terjadi bencana di wilayah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
42. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk memantau ancaman bencana dan menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
43. Apakah di daerah Anda telah tersedia metode riset standar yang diakui dan digunakan secara kolektif untuk kajian multi risiko yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana?	0	0
44. Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset?	0	0

PRIORITAS 3 (Indikator 4) =NILAI 3 = LEVEL 4

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
45. Apakah di daerah Anda telah terdapat berbagai media permanen (baik media cetak, elektronik, billboard, poster atau event/acara terorganisir yang tetap ada) untuk mempublikasikan pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
46. Apakah daerah Anda telah memiliki inisiatif untuk membangun desa tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang telah diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun Pemerintah https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
47. Apakah standar minimal materi publikasi dan desa tangguh tersebut diterapkan dalam strategi dan perencanaan terukurserta memperhitungkan momen Hari Pengurangan Risiko Bencana dalam pelaksanaannya?	0	0
48. Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasilan strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana?	0	0

PRIORITAS 4 (Indikator 1) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
49. Apakah di pemerintahan maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi secara proporsional terhadap Pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp IKPLHD KETEMU BU ANI DLH	1	0
50. Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp IKPLHD	1	0
51. Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko dasar (ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan iklim?	0	0
52. Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan?	0	0

PRIORITAS 4 (Indikator 2) = NILAI 1 = LEVEL 2

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
53. Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam kelompok-kelompok komunitas yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
54. Apakah telah ada aksi-aksi sosial (<i>seperti program kapasitas jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya</i>) untuk mengurangi kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial	0	0
55. Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah ancaman bencana?	0	0
56. Apakah telah terbangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas?	0	0

PRIORITAS 4 (Indikator 3) = NILAI 0 = LEVEL 1

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
57. Apakah sektor produksi telah mulai mengembangkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana kepadakelompok-kelompok kecil masyarakat dalam bentuk kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat?	1	0
58. Apakah ada perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor produksi yang secara tidak langsung perlindungan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana?	1	0
59. Apakah telah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan kapasitas komunitas dibidang ekonomi danproduksi yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana	1	0
60. Apakah telah terbangun iklim yang kondusif bagi peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektorproduksi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas komunitas dalam bidang perekonomian?	1	0

PRIORITAS 4 (Indikator 4) = NILAI 2 = LEVEL 3

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
61. Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
62. Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan, IMB dan perluasannya? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
63. Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu meminimalkan risiko bencana?	0	0
64. Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai dengan rencana tata guna lahan?	0	0

PRIORITAS 4 (Indikator 5) = NILAI 8 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
65. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana walau disusun sepihak tanpa menampung aspirasi korban ? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
66. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
67. Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko baru dari pembangunan?	0	0
68. Apakah rancangan tersebut telah terlaksana?	0	0

PRIORITAS 4 (Indikator 6) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
69. Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak lingkungan untuk proyek pembangunan besar? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
70. Apakah telah ada prosedur penilaian Analisis Risiko Bencana untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
71. Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko bencana untuk proyek-proyek lain seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
72. Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud kedalam strategi, rencana dan program pembangunan? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0

PRIORITAS 5 (Indikator 1) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
73. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang didukung relawan untuk melakukan praktik penanganan darurat bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
74. Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) dan/atau Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
75. Apakah personil perangkat darurat tersebut (Pusdalops dan/atau Komando Tanggap Darurat) telah memiliki kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
76. Menurut penilaian Anda, apakah upaya penanganan darurat bencana yang pernah dilaksanakan oleh seluruh pihak telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul?	0	0

PRIORITAS 5 (Indikator 2) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
77. Apakah telah ada latihan-latihan evakuasi? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
78. Apakah sudah ada rencana kontijensi untuk 2 potensi bencana di daerah anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
79. Apakah upaya penanganan darurat dilaksanakan berdasarkan rencana kontijensi dan rencana pemulihan bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDgsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
80. Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana kontijensi tersebut?	0	0

PRIORITAS 5 (Indikator 3) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
81. Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuandari pihak lain bila terjadi bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
82. Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
83. Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadidarurat bencana?	0	0
84. Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitaskritis?	0	0

PRIORITAS 5 (Indikator 4) = NILAI 4 = LEVEL 5

Pertanyaan Kunci	Respon	
	YA	TIDAK
85. Apakah di daerah Anda telah memiliki prosedur operasi standar untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusiterkait penanganan darurat bencana yang ada di daerah Anda? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
86. Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatanatau audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana? https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANeLJckGkDqsSbw&cid=A0DF6580106AFC83&id=A0DF6580106AFC83%21380&parId=A0DF6580106AFC83%21320&o=OneUp	1	0
87. Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan efektivitas operasi darurat di kemudian hari ?	0	0
88. Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang telah terjadi?	0	0

REKAP NILAI
INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) BPBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

NOMOR INDIKATOR	PRIORITAS	INDIKATOR	LEVEL	NILAI
1	1	1	4	3
2	1	2	3	2
3	1	3	3	2
4	1	4	4	3
TOTAL NILAI PRIORITAS 1			LEVEL 3	10
5	2	1	4	3
6	2	2	3	2
7	2	3	4	3
8	2	4	2	1
TOTAL NILAI PRIORITAS 2			LEVEL 2	9
9	3	1	3	2
10	3	2	2	1
11	3	3	3	2
12	3	4	3	2
TOTAL NILAI PRIORITAS 3			LEVEL 2	7
13	4	1	3	2
14	4	2	2	1
15	4	3	5	4
16	4	4	3	2
17	4	5	3	2
18	4	6	5	4
TOTAL NILAI PRIORITAS 4			LEVEL 2	15
19	5	1	4	3
20	5	2	4	3
21	5	3	3	2
22	5	4	3	2
TOTAL NILAI PRIORITAS 5			LEVEL 3	10
TOTAL NILAI SELURUH PRIORITAS				51

KESIMPULAN

TABEL REKAP PENILAIAN PER INDIKATOR

NO	STRUKTUR PERTANYAAN	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN "YA"	LEVEL	PROSENTASE PENCAPAIAN PER LEVEL
1	Pertanyaan Pertama	88	88	2	100 %
2	Pertanyaan Kedua	88	85	3	96,59 %
3	Pertanyaan Ketiga	88	74	4	84,09 %
4	Pertanyaan Keempat	88	68	5	77,27 %
Prosentase Rata-rata					89,49 %

Berdasarkan hasil rekap nilai diatas maka disimpulkan bawah Indeks Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta berada di LEVEL 2 dengan prosentase kuesioner yang terjawab sebesar 100 %. Sedangkan Level 3 hingga 5 memiliki prosentase Kuesioner terjawab kurang dari 100 % yakni masing-masing sebesar 96,59 % untuk level 3, 84,09 % untuk level 4 dan 77,27 % untuk level 5.

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

AUDITOR
PT. DAS CERTIFICATION



MUMPUNI YULIATRI, S. E, M. M

Surakarta, 01 Desember 2022
TIM PENYUSUN
CV. MAXIMA GLOBAL BISNIS



YAGI SUSETYO DEWI, S. E, M. Si, Akt

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGUALANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA**

VISI :

MISI : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

TUJUAN RPJMD :.....

TUJUAN SKPD :.....

TUGAS :1.

FUNGSI :1.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5					6	7	8
1	Meningkatkan kualitas Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pelayanan Informasi, Penyelamatan, Evakuasi, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	<p>Dinilai melalui kuesioner Hasil penilaian atas kuesioner terbagi menjadi beberapa tingkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana sebagai berikut;</p> <p>Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.</p> <p>Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.</p> <p>Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negative dari bencana.</p> <p>Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya financial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.</p> <p>Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.</p>	1	2	2	3	3	BPBD dan Instansi Terkait	Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta	